



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN II

DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, INFRASTRUKTUR, DAN PERDAGANGAN

Nomor : OT.04/LKIN-171/D401/1/2023
Tanggal : 27 Juni 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
1. Pendahuluan	1
a. Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	1
b. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	2
c. Kegiatan dan Layanan Produk	3
2. Perencanaan Kinerja	4
a. Target Kinerja Tahun 2020-2024	4
1) Rencana Strategis	4
2) Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	5
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	6
3. Akuntabilitas Kinerja	8
a. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023	8
b. Capaian Sasaran Program/Kegiatan	8
c. Analisis Capaian Kinerja	11
d. Capaian <i>Output</i> Triwulan II Tahun 2023	20
e. Kendala Pencapaian Target	20
f. Anggaran dan Realisasi Keuangan	21
4. Simpulan dan Rencana Tindak	21
A. Simpulan Kinerja Triwulan II Tahun 2023	21
B. Rencana Tindak Tahun 2023	26



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS,
INFRASTRUKTUR, DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta - 3120
Telepon (021) 8564867 Faksimile (021) 85906404

Nomor : OT.04/LKIN-171/D401/1/2023

27 Juni 2023

Lampiran : Satu Set

Hal : Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan
Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan
Perdagangan Triwulan II Tahun 2023

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan mempunyai tugas mengelola dan membina kegiatan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya di bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.
- 2) perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.
- 3) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.
- 4) pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.
- 5) pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan usaha dan badan lainnya bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- 6) pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.
- 7) pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.
- 8) pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan usaha dan badan lainnya di bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.
- 9) pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan usaha dan badan lainnya di bidang agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan.

b. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2021 terdiri atas Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- 1) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Badan Usaha Perkebunan.
- 2) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Badan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- 3) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Badan Usaha Infrastruktur dan Perdagangan.

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Badan Usaha Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan tugas dan fungsi Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang perkebunan serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Badan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai tugas memberikan pelayanan tugas dan fungsi Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Badan Usaha Infrastruktur dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan pelayanan tugas dan fungsi Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang infrastruktur dan perdagangan, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan jabatan disajikan pada tabel berikut ini:

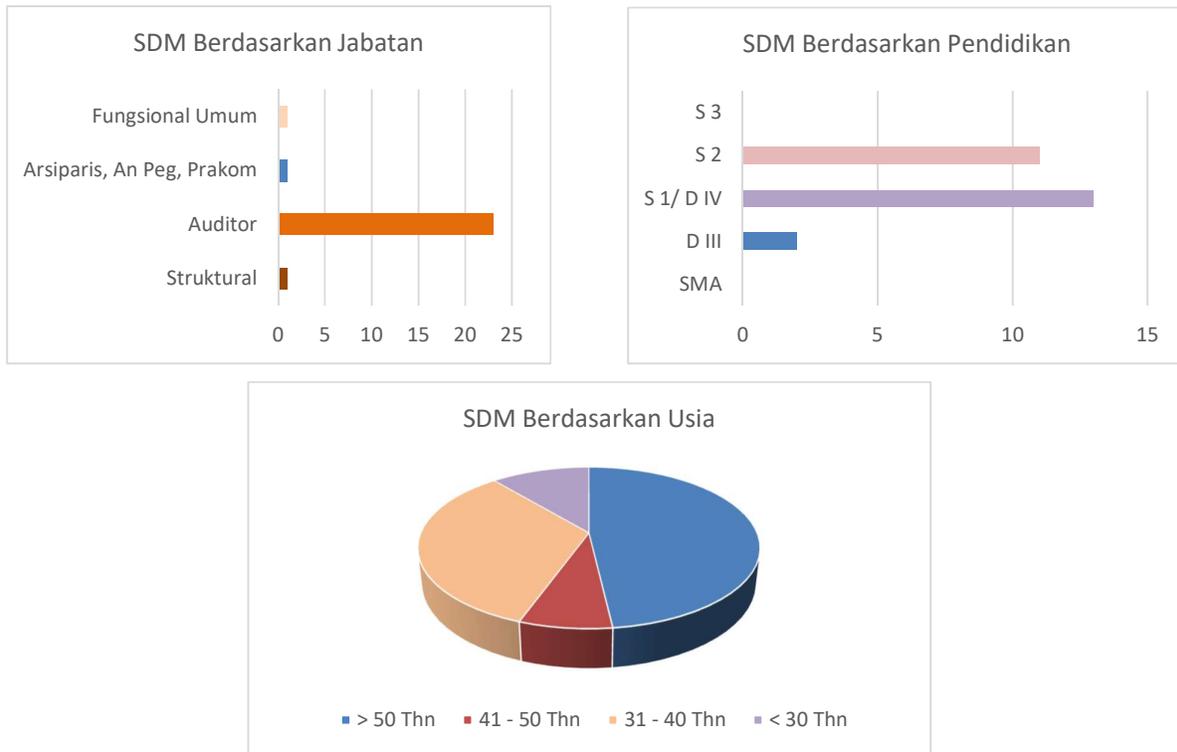
Tabel 1.1
SDM Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	1
2	Auditor Madya	6
3	Auditor Muda	7
4	Auditor Pertama	8
5	Auditor Penyelia	0
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	0
7	Auditor Pelaksana	2

No.	Jabatan	Jumlah
8	Keuangan, Pengadministrasi Umum, Sekretaris	2
	Jumlah	26

Sebaran sumber daya manusia berdasarkan jabatan, pendidikan, dan usia disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Sebaran Sumber Daya Manusia



c. Kegiatan dan Layanan Produk

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut:

- 1) Mendukung peningkatan kinerja korporasi dalam pencapaian program prioritas nasional, seperti Program Strategis Nasional Revitalisasi Industri Gula dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, Ketahanan Pangan, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol;
- 2) Mendukung peningkatan kinerja korporasi dalam mencapai target yang ditetapkan;
- 3) Membantu meningkatkan efektivitas *governance*, yaitu Sistem Pengendalian Intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko, dan kapabilitas SPI BUMN.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan memberikan layanan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1) kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit, reviu, evaluasi dan pemantauan; serta 2) kegiatan konsultansi (*consulting*) meliputi kegiatan bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

1) Pemberian Keyakinan (*Assurance*)

Kegiatan *assurance* bertujuan memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan *assurance* meliputi:

- **Audit:** proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi korporasi.
- **Reviu:** penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- **Evaluasi:** serangkaian kegiatan membandingkan hasil/capaian suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- **Pemantauan:** proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Konsultasi (*Consulting*)

Kegiatan konsultasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Kegiatan konsultasi meliputi:

- **Bimbingan Teknis:** kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- **Asistensi:** kegiatan membantu korporasi dalam rangka memperlancar tugas dan memberikan nilai tambah bagi korporasi.
- **Sosialisasi:** proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran informasi.

2. Perencanaan Kinerja

a. Target Kinerja Tahun 2020 - 2024

1) Rencana Strategis

Rencana Strategis Deputy Bidang Akuntan Negara Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BPKP sebagaimana tercantum dalam Renstra Deputy Bidang Akuntan Negara 2020-2024. BPKP memiliki dua tujuan yang akan diwujudkan dalam periode Renstra 2020-2024, yaitu:

- a) Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional.
- b) Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Tujuan 1 Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional

Tujuan pertama adalah "Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional". Tujuan ini dijabarkan dalam lima sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau pencapaian *outcome* program yang diselenggarakan. Kelima sasaran strategis tersebut adalah:

- a) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah.
- b) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional.

- c) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha.
- d) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.
- e) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian K/L/Pemda/BU.

Dari kelima sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Akuntan Negara akan berkontribusi pada empat sasaran strategis, yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3, dan 5. Dengan demikian, sasaran kegiatan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan berdasarkan Sasaran Strategis 1, 2, 3, dan 5 tersebut.

Tujuan 2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat
-----------------	--

Sasaran kinerja yang bersifat “enablers” perlu ditetapkan sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi dan mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerja. Sasaran kinerja *enablers* BPKP adalah “Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas”. Sasaran kinerja ini akan diwujudkan melalui program dukungan manajemen internal.

Tujuan kedua tersebut di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan ke 6 pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan.

2) Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tercapainya tujuan program pada tingkat kedeputian Bidang Akuntan Negara didukung oleh ketercapaian kegiatan yang dilakukan oleh unit eselon II pada Deputi Bidang Akuntan Negara. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan pengawasan akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Program pada Deputi Bidang Akuntan Negara terdiri dari Program 06 (Program Pengawasan Pembangunan) dan Program 01 (Program Dukungan Manajemen Internal). Program 06 (Program Pengawasan Pembangunan) merupakan gabungan dari seluruh sasaran program yang mendukung pencapaian target sasaran strategis pada tujuan pertama Renstra BPKP yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional. Program 01 (Program Dukungan Manajemen Internal) merupakan program yang mendukung pencapaian target sasaran pada tujuan kedua Renstra BPKP yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja program. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kegiatan	
Program 06: Program Pengawasan Pembangunan	
Kegiatan 23: Pengawasan Pembangunan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	
1	Sasaran kegiatan: Meningkatnya dukungan fiskal BUMN sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan terhadap keuangan negara

Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kegiatan		
	IKK 1	Jumlah BUMN agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara kategori Baik
	IKK 2	Persentase nilai efisiensi biaya pada badan usaha sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan
2	Sasaran kegiatan: Meningkatnya dukungan badan usaha sektor jasa keuangan, jasa penilai dan manufaktur terhadap pembangunan nasional	
	IKK 1	Jumlah badan usaha sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik
	IKK 2	Jumlah PSN pada badan usaha sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan yang mencapai target
3	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas operasional badan usaha sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan	
	IKK 1	Persentase badan usaha sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan kepatuhan dan efektivitas operasional baik
4	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola BUMN sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan	
	IKK 1	Persentase BUMN sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan tata kelola korporasi baik
	IKK 2	Persentase BUMN sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan kinerja sehat
5	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas pengendalian intern BUMN sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan	
	IKK 1	Persentase badan usaha sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan MRI \geq Level 3
	IKK 2	Persentase badan usaha sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3
Program 01: Pelaksanaan Dukungan Manajemen Internal		
1	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan unit kerja	
	IKK 1	Nilai Skor Zona Integritas Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan
	IKK 2	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi
	IKK 3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu
	IKK 4	Persentase penyusunan RKA tepat waktu
	IKK 5	Nilai SAKIP Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan
	IKK 6	Maturitas SPIP Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan
	IKK 7	Indeks MR Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

b. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Deputy Bidang Akuntan Negara untuk tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam target tahunan. Target ini merupakan tahapan pencapaian target

secara kumulatif untuk kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Target tahunan diharapkan dapat dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan. Dengan adanya target kinerja tahunan tersebut, diharapkan upaya pencapaian tujuan jangka menengah dapat lebih terarah. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan Tahun 2023 dan 2022 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	2023		2022	
			Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap keuangan negara dan daerah	1.1 Jumlah BUMN sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	6	Jumlah	8
		1.3 Jumlah/Persentase BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Kinerja Sehat	Jumlah	14	Jumlah	8
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah BUMN sektor agrobisnis, infrastruktur, dan perdagangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	9	Jumlah	8
		2.2 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	18	Jumlah	7
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	3.1 Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	9	Jumlah	10
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN	4.1 Jumlah/Persentase BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	7	Jumlah	15
5	Meningkatnya Akuntabilitas BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	5.1 Jumlah/Persentase BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	8	Jumlah	12
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	6.1 Jumlah/Persentase BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	28	Jumlah	14
		6.2 Jumlah/Persentase BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	8	Jumlah	7
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	7.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Dirwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	Persen	70	Persen	75
		7.2 Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	Jumlah	1
		7.3 Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	N/A	N/A
8	Meningkatnya kualitas implementasi Pengendalian Risiko pada Ditwas	8.1 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	Persen	70

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2023		2022	
		Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	8.2 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	Persen	100

3. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari komponen perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sasaran program diukur pada level Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan bertanggung jawab dalam pencapaian target pada sasaran kegiatan dan mendukung pencapaian sasaran program.

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan merupakan kinerja Subdirektorat Pengawasan di lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan. Uraian capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan disajikan dalam bagian berikut.

b. Capaian Sasaran Program/Kegiatan

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan mendukung capaian sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara. Secara rata-rata capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan yang mendukung sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara untuk triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 101,65%. Dukungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah:

- 1) Meningkatnya dukungan fiskal BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap keuangan negara sebesar 87,50%.
- 2) Meningkatnya dukungan BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap Pembangunan Nasional sebesar 104,86%.
- 3) Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sebesar 133,33%.
- 4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sebesar 100%.
- 5) Meningkatnya Akuntabilitas BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sebesar 150%.
- 6) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sebesar 137,50%.
- 7) Meningkatnya Kualitas Layanan Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sebesar 100%.
- 8) Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Dirwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan belum ada realisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang mendukung

sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisa- si TW II	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d. TW II		Tahun 2023	s.d. TW II	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = Rerata 8 per SK
1	Meningkatnya Pengawas- an Pembangunan atas du- kungan fiskal BUMN Sek- tor Agrobisnis, Infrastruk- tur, dan Perdagangan terhadap keuangan negara dan daerah							87,50%
1.1	Indikator 1.1 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infra- struktur, dan Perdagangan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	Jumlah	6	4	3	50,00%	75,00%	
1.2	Indikator 1.2 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infra- struktur, dan Perdagangan dengan kinerja sehat	Jumlah	14	8	8	57,14%	100,00%	
2	Meningkatnya Pengawas- an Pembangunan atas dukungan BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap Pembangunan Nasional							104,86%
2.1	Indikator 2.1 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infra- struktur, dan Perdagangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	Jumlah	9	9	11	122,22%	122,22%	
2.2	Indikator 2.2 Jumlah PSN pada BUMN Sektor Agro- bisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan yang tercapai sesuai target	Jumlah	18	8	7	38,89%	87,50%	
3	Meningkatnya Pengawas- an Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha							133,33%
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Badan Usaha Agrobisnis, Infra- struktur, dan Perdagangan dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	9	9	12	133,33%	133,33%	

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d. TW II		Tahun 2023	s.d. TW II	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan							100,00%
4.1	Indikator 4.1 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tata kelola korporasi Baik	Jumlah	7	7	7	100,00%	100,00%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan							150,00%
5.1	Indikator 5.1 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	8	8	12	150,00%	150,00%	
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan							137,50%
6.1	Indikator 6.1 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	28	28	28	100,00%	100,00%	
6.2	Indikator 6.2 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	Jumlah	8	4	7	87,50%	175,00%	
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan							100,00%
7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	%	70	70	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	1	1	100,00%	100,00%	33,33%
7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	1	2	200,00%	200,00%	66,67%
8	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan							0,00%

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d. TW II		Tahun 2023	s.d. TW II	
8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	%	70	70	0	0,00%	0,00%	
8.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	%	100	100	0	0,00%	0,00%	
Rerata Capaian								101,65%

c. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran kegiatan yang mendukung sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara. Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode renstra 2020-2024 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan. Renstra 2020-2024 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan Renstra periode 2015-2019, terutama dalam indikator dan pengukuran yang digunakan.

Analisis capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap keuangan negara dan daerah

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap keuangan negara dan daerah ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik.
- Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan kinerja sehat.

Capaian sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 137,50%.

Indikator Kinerja 1.1

Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik.

Badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori "Baik" diukur dengan indikator Icorpax dari Dimensi 2: Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara dengan realisasi capaian Dimensi 2 Icorpax $\geq 50\%$. Indikator Dimensi 2 mencakup parameter KN.1 Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (Kesehatan Keuangan Korporasi dan Growth Kinerja Keuangan) dan KN.2 Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (Capaian target *dividen payout ratio*, Persentase realisasi pembayaran pajak, Persentase Realisasi Pembayaran Penerimaan Negara Lainnya, dan Kontribusi dividen BUMN terhadap target dividen nasional (APBN)).

Penilaian dilakukan dengan mendapatkan nilai tertinggi dan terendah, dengan interval berdasarkan rata-rata atas hasil penilaian tertinggi dan terendah dibagi untuk 4 skala penilaian sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kriteria Pengkategorian dan Pengukuran Dukungan Fiskal

Uraian Capaian	Nilai	Predikat
80% < Capaian ≤ 100%	A	Sangat Baik
60% < capaian ≤ 80%	B	Baik
40% < capaian ≤ 60%	C	Cukup Baik
0% ≤ Capaian ≤ 40%	D	Kurang Baik

Hasil penilaian berdasarkan Dimensi 2 Icorpax dengan kategori Baik sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebanyak 3 BUMN atau 50%, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Penilaian Dukungan Fiskal Badan Usaha

No.	Perusahaan	Nilai	Predikat
I.	Klaster Perkebunan dan Kehutanan		
1.	PTPN III (Persero)	63,30%	Baik
2.	Perum Perhutani	62,73%	Baik
II.	Klaster Pangan dan Pupuk		
1.	Perum BULOG	56,48%	Cukup Baik
2.	PT Sang Hyang Seri	48,75%	Cukup Baik
3.	PT Perikanan Indonesia	40,45%	Cukup Baik
4.	PT RNI (Persero)	30,43%	Kurang Baik
5.	PT Berdikari	24,09%	Kurang Baik
III.	Klaster Infrastruktur		
1.	PT Adhi Karya	62,61%	Baik
2.	PT Jasa Marga (Persero)	56,14%	Cukup Baik
3.	PT Brantas Abipraya	55,11%	Cukup Baik
4.	PT Waskita Karya (Persero)	51,82%	Cukup Baik
5.	PT Wijaya Karya (Persero)	48,30%	Cukup Baik
6.	PT PP (Persero)	43,41%	Cukup Baik
7.	PT Hutama Karya (Persero)	43,18%	Cukup Baik

Indikator Kinerja 1.2

Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan kinerja sehat

Target jumlah BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan kinerja sehat sebanyak 14 BUMN atau 57,14% dengan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebanyak 8 BUMN, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Penilaian Kinerja Badan Usaha

No.	Perusahaan	Nilai	Predikat
I.	Klaster Perkebunan dan Kehutanan		
1.	PTPN III (Persero)	76,59%	Baik
2.	Perum Perhutani	75,45%	Baik
II.	Klaster Pangan dan Pupuk		
1.	Perum BULOG	82,95%	Sangat Baik
2.	PT Sang Hyang Seri	52,50%	Cukup Baik
3.	PT Perikanan Indonesia	60,19%	Baik
4.	PT RNI (Persero)	30,68%	Kurang Baik
5.	PT Berdikari	18,18%	Kurang Baik
III.	Klaster Infrastruktur		

No.	Perusahaan	Nilai	Predikat
1.	PT Jasa Marga (Persero)	82,27%	Sangat Baik
2.	PT Brantas Abipraya	80,23%	Baik
3.	PT Adhi Karya	75,23%	Baik
4.	PT Waskita Karya (Persero)	73,64%	Baik
5.	PT PP (Persero)	56,82%	Cukup Baik
6.	PT Hutama Karya (Persero)	56,36%	Cukup Baik
7.	PT Wijaya Karya (Persero)	46,59%	Cukup Baik

2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan terhadap Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- 2.1 Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik.
- 2.2 Jumlah PSN pada BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan yang tercapai sesuai target

Capaian sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 104,86%.

Uraian capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 2.1

Jumlah BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik

Badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori "Baik" diukur dengan indikator Icorpax dari Dimensi 1: Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional dengan realisasi capaian Dimensi 1 Icorpax $\geq 63\%$. Indikator Dimensi 2 mencakup parameter PB.1 Tingkat Kinerja Korporasi (Pencapaian target KPI) dan PB.2 Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan (Kesesuaian produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah, Penugasan pemerintah, Cakupan penugasan pemerintah, Pencapaian target penugasan, dan Penugasan dari Pemerintah yang Bermasalah (Penalty)).

Penilaian dilakukan dengan mengambil nilai tertinggi dan terendah, dengan interval berdasarkan rata-rata atas hasil penilaian tertinggi dan terendah dibagi untuk 4 skala penilaian sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Kriteria Pengkategorian dan Pengukuran Tingkat Dukungan Terhadap Pembangunan Nasional

Uraian	Nilai	Predikat
$80\% < \text{Capaian} \leq 100\%$	A	Sangat Baik
$60\% < \text{capaian} \leq 80\%$	B	Baik
$40\% < \text{capaian} \leq 60\%$	C	Cukup Baik
$0\% \leq \text{Capaian} \leq 40\%$	D	Kurang Baik

Target Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik adalah 9 BUMN dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 11 BUMN atau 122,22%, sebagai berikut:

Tabel 3.6

Hasil Penilaian Dukungan Pembangunan Badan Usaha

No.	Perusahaan	Nilai	Predikat
I.	Klaster Perkebunan dan Kehutanan		
1.	PTPN III (Persero)	88,13%	Sangat Baik
2.	Perum Perhutani	93,75%	Sangat Baik
II.	Klaster Pangan dan Pupuk		
1.	PT Berdikari	93,75%	Sangat Baik
2.	PT Sang Hyang Seri	70,63%	Baik
3.	PT RNI (Persero)	60,00%	Baik
4.	PT Perikanan Indonesia	35,00%	Kurang Baik
III.	Klaster Infrastruktur		
1.	PT Brantas Abipraya	100%	Sangat Baik
2.	PT Utama Karya (Persero)	100%	Sangat Baik
3.	PT Wijaya Karya (Persero)	100%	Sangat Baik
4.	PT Waskita Karya (Persero)	93,75%	Sangat Baik
5.	PT Jasa Marga (Persero)	88,75%	Sangat Baik
7.	PT Adhi Karya	82,50%	Sangat Baik

Indikator Kinerja 2.2

Jumlah PSN pada BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan yang mencapai target

Target jumlah PSN pada BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan tahun 2023 adalah 7 PSN dari target tahun 2023 sebanyak 18 PSN atau mencapai 38,89% yang selengkapnya disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
PSN Tol Sesuai Target

No.	PSN	Dit. Pengampu	Keterangan
I.	Triwulan II Tahun 2023		
1	PSN Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang	D401	Tercapai
2	PSN Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung	D401	Tercapai
3	PSN Pembangunan Ruas Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	D401	Tercapai
4	PSN atas Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera	D401	Tercapai
5	PSN Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai- bagian dari Trans Sumatera	D401	Tercapai
6	PSN Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran	D401	Tercapai
7	PSN Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere	D401	Tercapai

3

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu Jumlah Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Efektivitas Operasional Baik.

Capaian sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 12 BUMN dari target tahun 2023 9 BUMN atau mencapai 133,33%, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Penilaian Efektivitas Operasional Badan Usaha

No.	Perusahaan	Nilai	Predikat
I.	Klaster Perkebunan dan Kehutanan		
1.	PTPN III (Persero)	82,17%	Sangat Baik
2.	Perum Perhutani	76,42%	Baik
II.	Klaster Pangan dan Pupuk		
1.	PT Perikanan Indonesia	75,33%	Baik
2.	PT RNI (Persero)	71,50%	Baik
3.	Perum BULOG	68,25%	Baik
4.	PT Berdikari	66,33%	Baik
5.	PT Sang Hyang Seri	46,92%	Cukup Baik
III.	Klaster Infrastruktur		
1.	PT Brantas Abipraya	90,08%	Sangat Baik
2.	PT Utama Karya (Persero)	84,96%	Sangat Baik
3.	PT Waskita Karya (Persero)	82,79%	Sangat Baik
4.	PT Jasa Marga (Persero)	71,96%	Baik
6.	PT Adhi Karya	69,04%	Baik
7.	PT Wijaya Karya (Persero)	68,92%	Baik

Badan usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha “Baik” diukur dengan indikator Icorpax dari kelima Dimensi, yaitu Dimensi:

1. Akuntabilitas korporasi pada pembangunan
2. Akuntabilitas korporasi pada keuangan negara
3. Kepatuhan dan efektivitas operasional korporasi
4. Efektivitas sistem tata kelola korporasi
5. Efektivitas pengendalian fraud korporasi

Penilaian dilakukan dengan mendapatkan nilai tertinggi dan terendah, dengan interval berdasarkan rata-rata atas hasil penilaian tertinggi dan terendah dibagi untuk 4 skala penilaian, sebagaimana dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Kriteria Pengkategorian Efektivitas Operasional Badan Usaha

Uraian	Nilai	Predikat
80% < Capaian ≤ 100%	A	Sangat Baik
60% < capaian ≤ 80%	B	Baik
40% < capaian ≤ 60%	C	Cukup Baik
0% ≤ Capaian ≤ 40%	D	Kurang Baik

4

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan tata kelola korporasi Baik yang diukur dengan capaian skor GCG sesuai SK-16/S.MBU/2012.

Target kinerja untuk indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah 7 BUMN dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 7 BUMN atau mencapai 100%,

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Hasil Penilaian Tata Kelola Badan Usaha

No.	BUMN/Anper	2023	
		Skor	Predikat
I	Klaster Perkebunan dan Kehutanan		
1.	Perum Perhutani	86,54	Sangat Baik
II.	Klaster Pangan dan Pupuk		
1.	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	76,15	Baik
2.	PT Sang Hyang Seri (Persero)	57,60	Kurang Baik
III.	Klaster Infrastruktur		
1.	PT Utama Karya (Persero)	86,71	Sangat Baik
2.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	86,81	Sangat Baik
3.	PT Waskita Beton Precast Tbk.	81,49	Baik
4.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	95,12	Sangat Baik
5.	PT Nindya Karya	90,43	Sangat Baik

5

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Akuntabilitas BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Pencapaian Sasaran strategis 5: Meningkatnya Akuntabilitas BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik.

Capaian sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 150%.

Indikator ini merupakan indikator Icorpax dari Dimensi 3: Kepatuhan dan Efektivitas Operasional dengan realisasi capaian Dimensi 3 Icorpax $\geq 52\%$. Indikator Dimensi 3 Icorpax mencakup parameter OP.1 Tingkat Kepatuhan (Permasalahan Hukum yang Dihadapi, Kepatuhan terhadap Regulasi Industri Tertentu); OP.2 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan CSR (Keselarasan Program TJSL dengan Program prioritas pencapaian SDG's, Keberadaan Program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Share Value (CSV) bagi perusahaan, Jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha); OP.3 Tingkat Kepuasan (Indeks Kepuasan Pelanggan, Indeks Kepuasan Vendor, Employee Engagement), OP.4 Tingkat Efektivitas Proses Bisnis (Pemenuhan Service Level Agreement, Penerapan E-Procurement, Keberadaan Inovasi, Penerapan Teknologi Informasi, dan Pengelolaan SDM); dan OP.5 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset (Asset Management Policy, Asset Management Plans, Asset Portfolio, ROA (Return on Asset), Fixed Assets Turnover) dengan kriteria pengkategorian dan pengukurannya dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Kriteria Pengkategorian dan Pengukuran Akuntabilitas Badan Usaha

Uraian	Nilai	Predikat
80% < Capaian \leq 100%	A	Sangat Baik
60% < capaian \leq 80%	B	Baik
40% < capaian \leq 60%	C	Cukup Baik
0% \leq Capaian \leq 40%	D	Kurang Baik

Target indikator kinerja Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik untuk tahun 2023 adalah 8 BUMN, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 realisasi sebanyak 12 BUMN atau mencapai 150%, sebagai berikut:

Tabel 3.12
Hasil Penilaian Akuntabilitas Badan Usaha

No.	Perusahaan	Nilai	Predikat
I.	Klaster Perkebunan dan Kehutanan		
1.	PTPN III (Persero)	85,57%	Sangat Baik
2.	Perum Perhutani	80,25%	Sangat Baik
II.	Klaster Pangan dan Pupuk		
1.	Perum BULOG	77,71%	Baik
2.	PT RNI (Persero)	68,98%	Baik
3.	PT Sang Hyang Seri	57,90%	Cukup Baik
4.	PT Berdikari	73,23%	Baik
5.	PT Perikanan Indonesia	61,53%	Baik
III.	Klaster Infrastruktur		
1.	PT Utama Karya (Persero)	88,51%	Sangat Baik
2.	PT Adhi Karya	74,07%	Baik
3.	PT Waskita Karya (Persero)	75,91%	Baik
4.	PT Wijaya Karya (Persero)	82,19%	Sangat Baik
6.	PT Brantas Abipraya	85,96%	Sangat Baik
7.	PT Jasa Marga (Persero)	80,98%	Sangat Baik

6

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan MRI \geq Level 3.
- Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3.

Capaian sasaran kegiatan ini merupakan akumulasi dari tahun 2021. Capaian tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 150% dan 62,51%, sedangkan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 93,75%.

Indikator 6.1

Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan MRI \geq Level 3

Badan usaha dengan MRI "Baik" tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis; menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

Target indikator kinerja Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan MRI \geq Level 3 untuk tahun 2023 adalah 28 BUMN. Hasil penilaian maturitas penerapan MR atau level MRI di atas Level 3 sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 28 BUMN. Rincian hasil penilaian maturitas penerapan MR disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Hasil Penilaian Maturitas MR Badan Usaha

No.	BUMN/Anper	Dit. Pengampu	Level MR
1	Perum BULOG	D401	3
2	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	D401	3
3	PT Phapros	D401	3
4	PT Sang Hyang Seri (Persero)	D401	4
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	D401	3
6	PT Perkebunan Nusantara I	D401	3
7	PT Perkebunan Nusantara II	D401	3
8	PT Perkebunan Nusantara IV	D401	3
9	PT Perkebunan Nusantara V	D401	3
10	PT Perkebunan Nusantara VI	D401	3
11	PT Perkebunan Nusantara (PN) VII	D401	3
12	PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII	D401	3
13	PT Perkebunan Nusantara (PN) IX	D401	3
14	PT Perkebunan Nusantara X	D401	3
15	PT Perkebunan Nusantara XI	D401	3
16	PT Perkebunan Nusantara XII	D401	3
17	PT Perkebunan Nusantara XIII	D401	3
18	PT Perkebunan Nusantara XIV	D401	3
19	Perum Perhutani	D401	3
20	PT Utama Karya (Persero)	D401	4
21	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	D401	3
22	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	D401	3
23	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	D401	4
24	PT Wijaya Karya Beton (WIKA BETON)	D401	4
25	PT Brantas Abipraya (Persero)	D401	4
26	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	D401	4
27	PT Nindya Karya	D401	4
28	PT Virama Karya (Persero)	D401	3

Indikator 6.2

Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis , Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3

Indikator Jumlah BUMN Sektor Agrobisnis , Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3 diukur berdasarkan jumlah SPI BUMN yang memiliki Kapabilitas SPI minimal Level 3. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Target indikator kinerja persentase BUMN sektor Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern level \geq 3 pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah 7 BUMN, sedangkan tahun 2023 adalah 8 BUMN. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 terdapat 7 BUMN dengan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern level \geq 3.

Rincian hasil penilaian Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern Level \geq 3 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14

Hasil Penilaian Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern Level ≥ 3 Badan Usaha

No.	BUMN/Anper	Dit. Pengampu	Level SPI
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	D401	3
2	PT Perkebunan Nusantara (PN) IV	D401	3
3	PT Perkebunan Nusantara (PN) VII	D401	3
4	PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII	D401	3
5	PT Perkebunan Nusantara (PN) IX	D401	3
6	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	D401	3
7	PT RNI (Persero)	D401	3

7

Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Layanan Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Layanan Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- Indeks Kualitas Layanan Eksternal Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan.
- Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi.
- Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan.

Capaian sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Indikator 7.1

Indeks Kualitas Layanan Eksternal Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan.

Target indikator kinerja Indeks Kualitas Layanan Eksternal Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan tahun 2023 sebesar 70% dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi.

Indikator 7.2

Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi.

Target indikator kinerja jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi tahun 2023 adalah satu layanan. Realisasi jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah satu layanan atau mencapai 100%, yaitu aplikasi asesmen GCG BUMN berbasis *website*.

Indikator 7.2

Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan.

Target indikator kinerja jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan tahun 2023 adalah satu layanan. Realisasi jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah dua layanan atau mencapai 200%, yaitu asesmen GCG BUMN dan bimbingan teknis *self assessment* GCG BUMN menggunakan aplikasi berbasis *website*.

8

Sasaran Kegiatan 8: Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Ditwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 8: Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Dirwas Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan ditunjukkan oleh pencapaian dua

indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja).
- b. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja).

Capaian sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi.

Indikator 8.1

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja).

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan diukur dengan melakukan penilaian maturitas SPIP pada Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan.

Target indikator kinerja Indeks Kualitas Layanan Eksternal Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan tahun 2023 adalah 70%. Realisasi Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi.

Indikator 8.2

Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja).

Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) diukur dengan persentase penyelesaian RTP MRI pada Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan.

Target indikator Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) tahun 2023 adalah 100%. Realisasi Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi.

d. Capaian *Output* Triwulan II Tahun 2023

Realisasi *output* Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Ringkasan Capaian *Output*
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Tw II 2023	Capaian (%)
1.	4221.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	4	4	100,22%
2.	4221.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	4	4	100,00%
3.	4221.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	1	3	300,00%
4.	4221.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	2	2	100,00%
5.	4221.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	2	200,00%
6.	4221.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	3	75,00%
		Jumlah	16	18	112,50%

e. Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum dijumpai kendala berarti yang dapat menghambat pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

f. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar **Rp762.718.047,00** atau **51,56%** dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.479.200,00 dengan ringkasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Ringkasan Realisasi Anggaran
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw II 2023 (Rp)	Capaian (%)
1.	4221.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	196.200.000	91.791.600	46,78%
2.	4221.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	484.380.000	275.695.850	56,92%
3.	4221.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	186.200.000	67.609.600	36,31%
4.	4221.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	75.600.000	47.040.000	62,22%
5.	4221.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	219.800.000	75.409.997	34,31%
6.	4221.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	317.020.000	205.171.000	64,72%
Jumlah			1.479.200.000	762.718.047	51,56%

4. Simpulan dan Rencana Tindak

a. Simpulan Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2023

Laporan kinerja triwulan II tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor OT.04/S-933/SU/01/2023 tanggal 13 Juni 2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2023. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan menetapkan enam sasaran kegiatan. Keenam sasaran kegiatan tersebut mendukung enam sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara.

Secara keseluruhan, target sasaran kegiatan Tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan sampai dengan triwulan II telah tercapai sebesar 82,65%. Capaian ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Sinergi antar Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Perwakilan BPKP untuk mencapai target.
- Arah dan koordinasi Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan dengan Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Perwakilan BPKP untuk menjaga standar mutu pengawasan.
- Kompetensi sumberdaya manusia yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan.
- Penggunaan aplikasi dalam pengawasan yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

- Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu *dimanage*, antara lain:
- Kompetensi SDM yang masih belum merata terkait pengawasan di Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan, baik kompetensi dalam substansi maupun kompetensi lainnya, misalnya terkait teknologi informasi.
 - Sarana dan prasarana yang belum memadai terutama untuk pengawasan yang menggunakan aplikasi berbasis *website* dengan *database* dalam jumlah yang besar sehingga diperlukan sarana yang memadai untuk melakukan pengolahan data.

b. Rencana Tindak Untuk Triwulan III Tahun 2023

Untuk mencapai kinerja tahun 2023 dan meningkatkan kinerja dibandingkan dengan tahun 2022, Dirwas BU Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan menetapkan rencana tindak triwulan III tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan kualitas pengendalian intern, antara lain: tata kelola (GCG), manajemen risiko, kapabilitas satuan pengawas intern korporasi, dan pengawasan program pemulihan ekonomi nasional pada BUMN/anak perusahaan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN dalam menyelenggarakan operasi perusahaan dan mendukung pembangunan.
- 3) Mengembangkan metode pengawasan berbasis IT (*data base* dan aplikasi).
- 4) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Heli Restiati

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, INFRASTRUKTUR, DAN PERDAGANGAN**